LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2040

III. INDIKASI PROGRAM

Indikasi Program Pembangunan di Setiap Zona Pengembangan di WP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040																						
No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Rencana Program Tahapan Pembangunan																	
					Tahap I 2020-2025					Tahap II 2026-2030					Tahap III 2031-2035					Tahap IV 2036-2040				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	**Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum**																							
1	**Zona Pariwisata**																							
1,1	Program pengembangan destinasi pariwisata	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN,APBD, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Korporasi																				
1,2	Program pengembangan sumberdaya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataan			Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Korporasi																				
1,3	Monitoring dan evaluasi kegiatan Pariwisata bahari sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang			Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Korporasi																				
2	**Zona Pelabuhan**																							
2.1	Pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pelabuhan perikanan.	Zona Pelabuhan	APBN,APBD	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																				
2.2	Program pemenuhan sarana dan prasarana transportasi laut di kawasan pusat ekonomi dan pulau-pulau kecil	Seluruh Kabupaten/ Kota Pesisir	APBN,APBD, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan serta Korporai																				
2.3	Program Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pendukung pelabuhan umum	Zona Pelabuhan	APBN,APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																				
2.4	Program pengembangan pelabuhan																							
2.5	Program Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan																							
2.6	Program peningkatan pelayanan di bidang perhubungan laut	Seluruh Kabupaten/ Kota Pesisir																						
2.7	Program penyuluhan keselamatan pelayaran																							
2,8	Monitoring dan evaluasi kegiatan Kepelabuhanan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang																							
3	**Zona Pertambangan**																							
3,1	Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral	Zona Pertambangan dan zona lainnya yang diperbolehkan	APBD, APBN dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	Dinas Energi dan Sumber daya mineral dan Kementerian Energi dan Sumber daya mineral serta Korporasi																				
3,2	Program Pengawasan Kegiatan Usaha pertambangan	Zona Pertambangan	APBD, APBN	Dinas Energi dan Sumber daya mineral dan Kementerian Energi dan Sumber daya mineral																				
3,3	Program penyusunan standarisasi teknologi penambangan ramah lingkungan			Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup																				
3,4	Program Penyusunan Standar Baku MutuLingkungan untuk kegiatan penambangan di laut			Dinas lingkungan hidup Daerah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup																				

3.5	Program pengawasan pengelolaan limbah akibat penambangan			Dinas Energi Sumberdaya Mineral, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan																				
3,6	Monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan secara berkala dengan parameter-parameter pengukuran berkelanjutan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang																							
4	**Zona Perikanan Tangkap**																							
4.1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Seluruh Kabupaten/ Kota	APBD, APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kelautan Perikanan																				
4,2	Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap																							
4,3	Pengelolaan Ruang Laut Perikanan Tangkap																							
4,4	Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap																							
4,5	Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Tangkap																							
4,6	Monitoring dan evaluasi kegiatan Perikanan Tangkap sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang																							
5	Perikanan Budidaya																							
5,1	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Seluruh Kabupaten/ Kota	APBD, APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kelautan Perikanan																				
5,2	Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya																							
5,3	Pengelolaan Ruang Laut Perikanan Budidaya																							
5,4	Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Budidaya																							
5,5	Peningkatan Pelayanan Teknis Budidaya Ikan Air Payau																							
5,6	Peningkatan Pelayanan Teknis Budidaya Ikan Air Laut																							
5,7	Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Budidaya																							
5,8	Monitoring dan evaluasi kegiatan Perikanan Budidaya sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang																							
6	**Zona Industri**																							
6.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Seluruh Kabupaten/ Kota Pesisir	APBD , APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan																				
6.2	Program Pengendalian izin usaha industri		APBD, APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustri dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian																				
6.3	Program sarana dan prasarana industri	Seluruh Kabupaten/ Kota Pesisir	APBD, APBN, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Korporasi																				
6,4	Program Pengembangan sumberdaya,fasilitasi dan akses industri			Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Korporasi																				
6,5	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Korporasi																				

B	**Rencana Kawasan Konservasi**																										
1	**Kawasan Konservasi Perairan**																										
1,1	Pengelolaan Ruang Laut	Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir	APBD, APBN, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Korporasi																							
1,2	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan																										
1,3	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Laut dan Perikanan	Zona Kawasan Konservasi Perairan																									
1,4	Monitoring dan Evaluasi kegiatan di Kawasan Konservasi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang																										
C	**Rencana Alur Laut**																										
1	**Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan**																										
1.1	Program penerapan sistem alur pelayaran	Zona Alur Pelayaran	APBD , APBN	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL																							
1,2	Program penetapan daerah labuh kapal sesuai kepentingannya			Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral																							
1.3	Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran lokal			Dinas Perhubungan																							
1.4	Program pembangunan dan pengembangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Keselamatan pelayaran			Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan																							
1.5	Program pemeliharaan berkala utilitas alur pelayaran			Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan																							
1.6	Program pengetatan aturan pengendalian buangan limbah kapal	Seluruh Kabupaten/ Kota Pesisir		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																							
1,7	Monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan alur pelayaran sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Zona Alur Pelayaran																									
2	Pipa dan Kabel Bawah Laut																										
2.1	Program sosialisasi pipa dan kabel bawah laut	Zona Alur Kabel Bawah Laut	APBD, APBN, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika																							
2.2	Program pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut																										
2.3	Program pemasangan tanda larangan jangkar pada pipa dan kabel laut																										
2,4	Program monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan pipa dan kabel bawah laut																										
3	Migrasi Biota Laut																										
3.1	Program identifikasi, alur, migrasi dan tingkah laku	Zona Alur Migrasi Biota Laut	APBD , APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia, Dinas Perikanan dan Kelautan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi																							
3.2	Program pemasangan dan pemeliharaan tanda pada titik dan migrasi biota laut																										
3.3	Program sosialisasi alur migrasi biota laut untuk menghindari tabrakan dengan pelayaran																										
3.4	Program monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan migrasi biota laut																										
4	Mitigasi Bencana																										
4,1	Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Seluruh Kabupaten/ Kota Pesisir	APBN, APBD, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah	BPBD, BNPB, DISKOMINFO, Relawan serta Korporasi																							
4,2	Rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan Bencana			BPBD, PUPR, BNPB, DKP, Dinas Kehutanan Serta Korporasi																							
4,3	Program monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana			BPBD, PUPR, BNPB, DKP, Dinas Kehutanan Serta Korporasi																							